

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari taraf pendidikan yang diperoleh setiap warga negaranya. Secara tidak langsung pendidikan memiliki peran yang strategis dalam rangka memberikan pencerdasan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan oleh berbagai elemen yang ada, baik keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan pelatihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah serta berlangsung sepanjang hayat untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas, yang mampu memainkan peranan dalam lingkungan masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya.

Proses belajar pada dasarnya merupakan suatu upaya dalam membentuk dan menyempurnakan kepribadian manusia dengan berbagai tuntutan dan kebutuhan dalam kehidupan. Belajar sendiri tidak lepas dari proses mengamati, merasakan, mengkaji, memahami, meyakini dan melakukan segala sesuatu kebenaran yang memberikan jalan untuk pencapaian apa yang di cita-citakannya.

Melalui Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 memaparkan tujuan dari pendidikan nasional Indonesia yaitu "... berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab." Dengan demikian pendidikan harus mampu mencetak warga negara yang sesuai dengan apa yang dijadikan tujuan oleh pendidikan nasional terutama dalam hal ini pendidikan formal (sekolah).

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai bagian dari kurikulum sekolah perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan dari pendidikan nasional. Djahiri (1994/1995, hlm. 9) mengemukakan bahwa hakikat dan tujuan mata pelajaran PPKn adalah:

Secara umum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah rekayasa untuk menanamkan nilai moral dan UUD 1945 sebagai kepribadian dan perilaku warga negara, masyarakat, bangsa dan negara Indonesia sehingga

dapat terbina astragtra kehidupan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang memiliki kepribadian dan keterampilan hidup, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mata pelajaran PPKn di sekolah memiliki tujuan agar peserta didik mampu mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi dirinya dalam kehidupan sehari-hari dan kehidupan di masa akan datang.

Soemantri (2001, hlm. 299) mengungkapkan Pendidikan Kewarganegaraan diartikan sebagai berikut :

Pendidikan Kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat dan orang tua, yang kesemuanya itu di proses guna melatih para siswa untuk berfikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Hal ini sejalan dengan tujuan mata pelajaran PPKn yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah, dijelaskan bahwa tujuan PPKn ialah untuk membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
2. Berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;
3. Sehat, mandiri, dan percaya diri;
4. Toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab;
5. Berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 ayat (2) menyatakan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan warga negara serta pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara”.

Meninjau dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya PPKn memiliki tujuan dalam membentuk warga negara yang baik dan cerdas (*to be good and smart citizenship*), untuk mencapai tujuan tersebut maka kita harus menciptakan proses pembelajaran yang sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga peserta didik dapat memahami pembelajaran yang disampaikan yang kemudian akan diaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Pemahaman peserta didik ini bisa dilihat dari keaktifannya di kelas ketika mengikuti proses pembelajaran berlangsung, seperti dalam hal tumbuhnya keberanian dan kemampuan mengemukakan pendapat.

Kemampuan mengemukakan pendapat haruslah ditanamkan sejak dini terutama di sekolah ketika proses pembelajaran berlangsung. Di era reformasi ini, kebebasan dalam mengemukakan pendapat merupakan salah satu aspek yang diperjuangkan dalam rangka menegakkan demokrasi. Kebebasan mengemukakan pendapat bahkan telah di legalkan oleh hukum dasar negara Indonesia yakni melalui UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”, kemudian dalam Pasal 28 E ayat 3 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Tujuan dari dibentuknya pengaturan terkait kebebasan berpendapat berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan berpendapat Pasal 4 ialah:

1. Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945
2. Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat
3. Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan dalam kehidupan demokrasi
4. Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok

Dalam mengemukakan pendapat dimanapun kita harus tetap menjunjung prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide, pikiran, gagasan atau pendapat kita dapat dikemukakan secara bebas tanpa adanya tekanan dari siapapun. Prinsip kedua yaitu bertanggung jawab artinya bahwa segala ide,

pikiran, gagasan atau pendapat kita harus dilandasi oleh akal sehat, niat baik serta norma sosial yang berlaku agar dapat dipertanggung jawabkan. Seiring dalam perkembangannya, kini kebebasan mengemukakan pendapat mendapat ruang yang lebih luas serta aksesnya yang begitu mudah sejalan dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang semakin pesat. Media sosial salah satunya, menjadi wadah yang strategis bagi siapapun termasuk peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya.

Namun pada kenyataannya dalam proses pembelajaran, kemampuan mengemukakan pendapat di kelas belum dicapai secara optimal. Hanya sebagian kecil peserta didik yang mampu mengemukakan pendapatnya. Padahal, kemampuan mengemukakan pendapat ini merupakan salah satu indikator dari partisipasi serta kemampuan peserta didik dalam memahami dan menyikapi materi pembelajaran yang telah disampaikan.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, diperoleh fakta bahwa sebagian besar proses pembelajaran PPKn di sekolah masih belum sesuai dengan tujuan pembelajaran PPKn itu sendiri. Apabila dilihat dari proses pembelajarannya, mata pelajaran PPKn kurang mengakomodir kebutuhan peserta didik secara optimal atau model pembelajaran yang kurang bervariasi sehingga kurang menimbulkan minat dan partisipasi belajar peserta didik khususnya dalam hal kemampuan mengemukakan pendapat. Peserta didik menganggap bahwa PPKn sebagai mata pelajaran yang membosankan dan cenderung kurang disukai karena materi dan model yang digunakan dalam pembelajaran dirasakan kurang menarik bagi peserta didik.

Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan model pembelajaran *time token* yang belum pernah digunakan guru dalam pembelajaran PPKn di kelas. Masih adanya penerapan gaya mengajar guru yang kurang menarik, dimana pembelajaran masih berpusat pada guru sebagai sumber utama pengetahuan dan penggunaan metode ceramah yang dominan dijadikan pilihan utama strategi belajar di kelas sehingga metode yang digunakan dalam pembelajaran PPKn kurang bervariasi mengakibatkan rendahnya partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran khususnya kurang tergalinya kemampuan mengemukakan pendapat

peserta didik. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Mc. Leish (dalam Solihatin, 2012, hlm. 123):

Keberhasilan metode ceramah tergantung harapan siswa, jika siswa menyukai, maka penggunaan metode ceramah akan berfaedah, sebaliknya jika siswa tidak menyukai maka penggunaan metode ceramah akan menemui kegagalan.

Selanjutnya terkait kelemahan metode ceramah terletak pada partisipasi siswa yang rendah, kemajuan peserta sulit dipantau, demikian pula minat dan perhatian peserta (Atwi Suparman, 1993, hlm. 166).

Dalam pembelajaran PPKn, Peserta didik sering dihadapkan pada suatu isu yang kontroversial dan masalah yang kompleks. Oleh karena itu berfikir kritis memunculkan ide-ide dan kemampuan mengemukakan pendapat dalam pembelajaran PPKn itu sangat dibutuhkan. Keduanya merupakan kemampuan berpikir manusia tingkat tinggi yang dapat mendorong seseorang untuk senantiasa memandang setiap masalah secara kritis serta mencoba untuk menyelesaikannya secara efektif.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis setelah melakukan observasi ditemukan beberapa permasalahan meliputi, *pertama*, penulis menemukan masalah terkait masih kurangnya partisipasi belajar peserta didik, hal ini dapat dilihat dari kurangnya respon peserta didik terhadap pembelajaran PPKn yang di sampaikan guru dan peserta didik cenderung pasif, hal ini dapat dilihat ketika guru memberikan kesempatan untuk bertanya terkait materi yang disampaikan, memberikan tanggapan terkait suatu peristiwa, hanya ada dua sampai tiga peserta didik saja yang mengajukan pertanyaan dan memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan bahkan cenderung mendominasi pembelajaran sedangkan yang lainnya pasif. *Kedua*, pada saat peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru, sebagian peserta didik hanya diam saja dan sebagian lagi membuka buku, namun hanya sedikit peserta didik yang mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Adapun alasan masih rendahnya respon peserta didik dalam memberikan jawaban atas pertanyaan guru disebabkan oleh beberapa faktor, seperti masih merasa ragu atas jawaban yang dimiliki, takut salah menjawab, merasa malu berbicara dihadapan teman-teman, dan terakhir kurang memanfaatkan buku sumber yang ada.

Permasalahan-permasalahan pembelajaran tersebut lebih mengarah kepada masih rendahnya kemampuan mengemukakan pendapat yang dimiliki peserta didik, hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya kemampuan bertanya, memberikan tanggapan dan menjawab pertanyaan. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, diperlukan adanya pemecahan terhadap permasalahan rendahnya kemampuan mengemukakan pendapat peserta didik. Kemampuan mengemukakan pendapat merupakan salah satu keterampilan yang perlu dikembangkan kepada peserta didik agar dapat memberikan manfaat bagi kehidupannya di masa yang akan datang terutama untuk menampilkan partisipasinya sebagai warga negara di negara yang menganut demokrasi.

Kemampuan mengemukakan pendapat sangat penting dimiliki oleh peserta didik, karena kemampuan ini merupakan salah satu aspek dari keterampilan berpikir. Peserta didik perlu dilatih agar dapat mengemukakan pendapatnya supaya bisa memunculkan daya berpikir analitis, kritis, dan solutif. Peserta didik juga perlu dilatih untuk menggunakan kata-kata yang tepat dan sistematis, sehingga menjadi sebuah kalimat yang jelas, yang kemudian mudah dipahami oleh orang lain yang mendengarkannya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Parera (1984, hlm. 156) yaitu:

Untuk dapat mengutarakan pendapat dengan jelas sehingga mudah dimengerti itu, orang perlu belajar dan melatih diri menggunakan kata-kata yang tepat dan menyusunnya menjadi kalimat yang baik disamping ia harus dapat pula mengutarakan gagasan itu dalam urutan yang logis.

Pemaparan di atas menegaskan bahwa kemampuan mengemukakan pendapat sangat penting diterapkan dalam proses pembelajaran khususnya dalam pembelajaran PPKn, karena dalam pembelajaran PPKn banyak akan informasi mengenai peristiwa-peristiwa penting dan fakta-fakta kekinian yang dapat merangsang peserta didik untuk berpikir kritis kemudian melatih kemampuan mengemukakan pendapatnya. Kemampuan dalam berpendapat ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi kehidupannya kelak di lingkungan masyarakat, peserta didik kelak akan peka, responsif dan mampu menyelesaikan permasalahan sosial yang ada dengan efektif dan solutif.

Berdasarkan keterbatasan dan kekurangan yang penulis identifikasi di lapangan, dengan mengingat betapa pentingnya kemampuan mengemukakan

pendapat ini untuk peserta didik, penulis mencoba mengatasi permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian dan melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran *time token* untuk meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat peserta didik dalam pembelajaran PPKn.

Model pembelajaran *time token* tersebut dipilih karena akan memacu dan melatih peserta didik untuk berpikir kritis, analitis, logis kemudian mengemukakan pendapatnya, model pembelajaran *time token* juga dapat memacu peserta didik untuk aktif secara keseluruhan, tidak ada peserta didik yang terlalu mendominasi dalam mengemukakan pendapat dan tidak ada peserta didik yang pasif dengan tidak sama sekali menyampaikan pendapatnya. Adapun yang menjadi dasar peneliti memilih model pembelajaran *time token*, model ini memiliki beberapa keunggulan. Sesuai yang dikemukakan oleh Yenni Sendiko (2012) kelebihan model pembelajaran *time token* antara lain:

1. Semua siswa aktif dalam mengeluarkan pendapatnya dan berpartisipasi dalam diskusi
2. Dapat menumbuhkan dan melatih keberanian siswa dalam berpendapat bagi siswa yang pemalu dan sukar berbicara
3. Semua siswa mendapat waktu bicara yang sama sehingga tidak akan terjadi pendorinasian pembicaraan dalam berlangsungnya diskusi. Semua siswa mendapat kesempatan untuk menggali dan mengemukakan ide-idenya sehingga pada kondisi seperti apapun ikut terlibat memahami materi pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mencoba mengungkapkan mengenai “penerapan model *time token* untuk meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat dalam pembelajaran PPKn”. (Penelitian Tindakan Kelas Pada Peserta Didik Kelas VII H di SMP Negeri 5 Bandung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat dua rumusan masalah, yaitu rumusan secara umum dan secara khusus. Secara umum, fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah memperoleh gambaran yang jelas dalam upaya meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat peserta didik dalam pembelajaran PPKn melalui model pembelajaran *time token*.

Adapun rumusan masalah secara khusus pada penelitian ini, meliputi :

1. Bagaimana perencanaan model pembelajaran *time token* pada mata pelajaran PPKn?
2. Bagaimana penerapan model pembelajaran *time token* untuk meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat peserta didik pada mata pelajaran PPKn?
3. Bagaimana peningkatan kemampuan mengemukakan pendapat peserta didik di kelas setelah diterapkannya model pembelajaran *time token*?
4. Apa kendala yang dihadapi dalam penerapan model pembelajaran *time token* pada mata pelajaran PPKn di SMPN 5 Bandung?
5. Bagaimana upaya guru untuk mengatasi kendala-kendala dalam menerapkan model pembelajaran *time token* pada mata pelajaran PPKn di SMPN 5 Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas terkait upaya meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat dalam pembelajaran PPKn melalui model pembelajaran *time token*. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui perencanaan penggunaan model pembelajaran *time token* pada mata pelajaran PPKn.
2. Untuk mengetahui penerapan model pembelajaran *time token* dalam meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat peserta didik pada mata pelajaran PPKn.
3. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan mengemukakan pendapat peserta didik di kelas setelah diterapkannya model pembelajaran *time token*.
4. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan model pembelajaran *time token* pada mata pelajaran PPKn di SMPN 5 Bandung.
5. Untuk mengidentifikasi upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kendala-kendala dalam menerapkan model pembelajaran *time token* pada mata pelajaran PPKn di SMPN 5 Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Secara umum penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan khususnya dalam pengembangan model pembelajaran PPKn yang bersifat demokratis, partisipatif, serta memiliki keterampilan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari.

2. Secara praktis

a. Guru

Guru terampil dalam menerapkan model pembelajaran *time token* khususnya pada mata pelajaran PPKn dalam upaya meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat peserta didik.

b. Peserta didik

Meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat peserta didik, sehingga peserta didik mampu berfikir kritis, analitis, solutif serta terlatih untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

c. Sekolah

Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di SMPN 5 Bandung, khususnya dalam hal optimalisasi pengembangan model pembelajaran PPKn.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi skripsi ini terdiri dari lima bab, yang terdiri atas:

1. Bab I merupakan bagian awal dari skripsi yang berisi lima bagian, yaitu latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.
2. Bab II berisikan kajian pustaka. Kajian pustaka berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Kajian pustaka berisi mengenai tinjauan umum tentang meningkatkan kemampuan mengemukakan pendapat dalam pembelajaran PPKn melalui penerapan model pembelajaran *time token* di SMPN 5 Bandung.

3. Bab III berisi penjabaran mengenai metode penelitian dan komponen lainnya, seperti desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.
4. Bab IV merupakan bab yang memaparkan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini terdiri dari dua hal utama, yakni deskripsi hasil penelitian dan pembahasan.
5. Bab V merupakan bab terakhir yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan penulis terhadap hasil analisis temuan penelitian. Bab ini terdiri dari dua bagian, yaitu simpulan dan rekomendasi.